



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP TAHUN 2025



KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Kecamatan Lolayan
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lolayan

II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lolayan
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

IV. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN LOLAYAN

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Kantor Kecamatan Lolayan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Adapun tugas pokok Kantor Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi :

1. Melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Melaksanakan tugas – tugas yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan
3. Melaksanakan tugas – tugas pembantuan.
4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bertolak dari tugas pokok diatas maka fungsi Kantor Kecamatan Lolayan adalah :

1. Pengorganisasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
2. Pengorganisasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengorganisasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas perekonomian
5. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan tata pemerintahan ditingkat kecamatan
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Lolayan berada di DesaTungoi I yang dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Merumuskan rencana, program dan kegiatan anggaran Kecamatan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
2. Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu,
3. Pembinaan Pemerintah Desa,
4. Pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban wilayah,
5. Pembinaan kesejahteraan masyarakat.

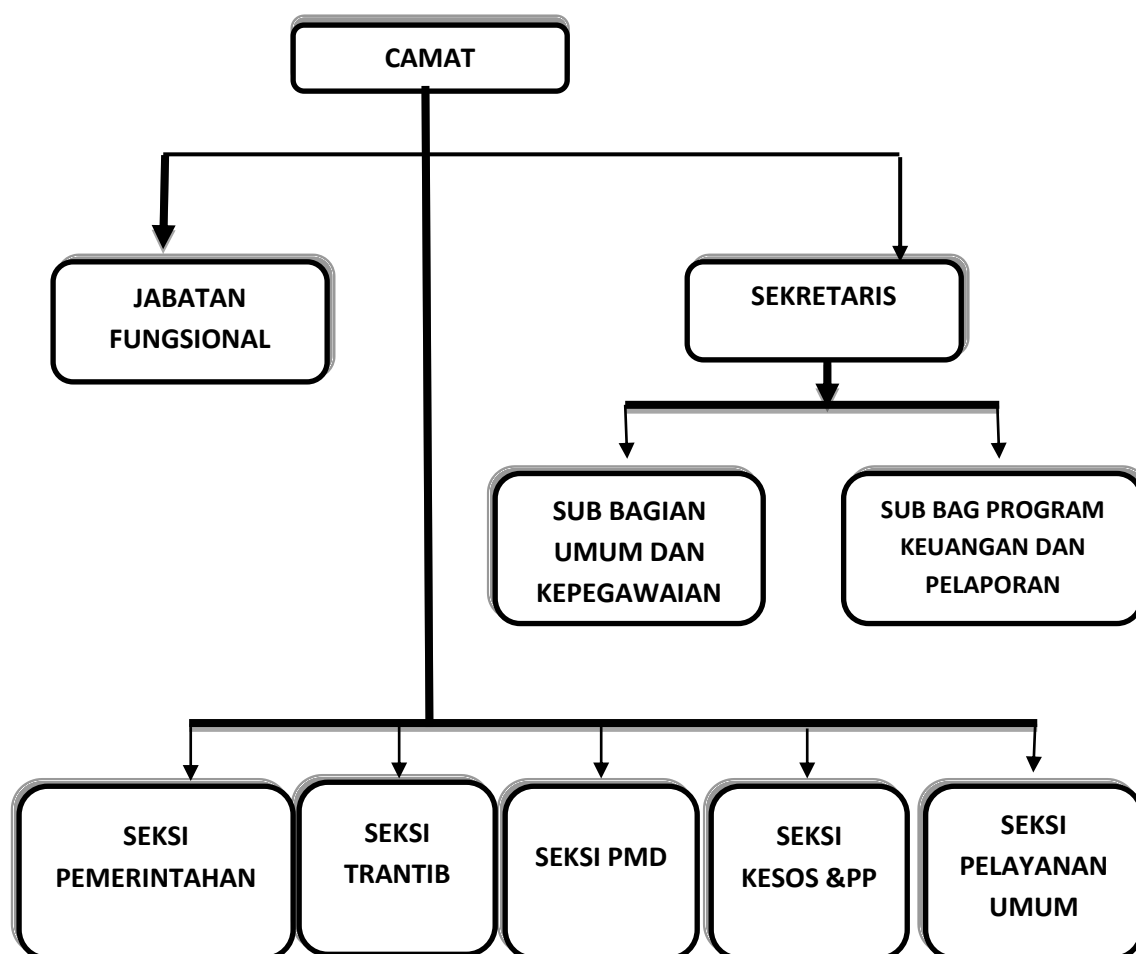
Dalam melaksanakan tugas, Camat dibantu oleh :

- a. Sekretaris Kecamatan,
- b. Seksi Pemerintahan,
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan,
- f. Seksi Pelayanan Umum.

Dalam melaksanakan tugas operasional pelayanan Administrasi Kecamatan, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Struktur Organisasi Kantor Camat Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor Tahun 2016 , sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------|
| • Camat | Eselon III/a |
| • Sekretaris Camat | Eselon III/b |
| • Kepala Seksi Pelayanan Umum | Eselon IV/a |
| • Kepala Seksi Pemerintahan | Eselon IV/a |
| • Kepala Seksi PMD | Eselon IV/a |
| • Kepala Seksi Kesos dan PP | Eselon IV/a |
| • Kepala Seksi Trantib | Eselon IV/a |
| • Kasubag Umum dan Kepegawaian | Eselon IV/b |
| • Kasubag Program, Keuangan & Pelaporan | Eselon IV/b |

Kantor Camat Lolayan mempunyai personil sebanyak 30 orang dan THL 1 Orang yang terdiri dari :

Golongan IV/b	= 2 Orang
Golongan III/d	= 4 Orang
Golongan III/c	= 4 Orang
Golongan III/b	= 2 Orang
Golongan III/a	= 6 Orang
Golongan II/d	= 7 Orang
Golongan II/c	= 1 Orang
Golongan II/b	= 1 Orang
Golongan II/a	= -
PPPK Gol V	= 2 Orang
Tenaga Harian Lepas	= 1 Orang

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan Lolayan sangat penting keberadaannya untuk masyarakat, hal ini disebabkan karena Kondisi dan potensi yang ada di Kecamatan Lolayan merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Lingkungan Strategi Kecamatan Lolayan adalah sebagai berikut :

a. Geografis

Kecamatan Lolayan mempunyai nilai historis dalam sejarah Kabupaten Bolaang Mongondow. Batas geografis kecamatan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan kotamobagu
- Sebelah Timur : kecamatan Modayag barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pinolosian
- Sebelah Barat : Kecamatan Dumoga

Topografi Kecamatan Lolayan beragam mulai dari dataran rendah dan bergelombang, Luas wilayah 559,86 km² dan jarak tempuh dari kecamatan ke ibukota kabupaten + /- 60 km.

Luas Kecamatan Lolayan keseluruhannya mencapai 29.700 Hektar. Terdiri dari 14 desa yaitu terdiri dari dua wilayah yaitu wilayah hulu ada 7 Desa dengan wilayah hilir ada 7 desa.

b. Kependudukan

Keadaan penduduk di Kecamatan Lolayan dengan jumlah penduduk 25.575 jiwa sesuai data Badan pusat statistic tahun 2022.

c. Sosial Politik

Perubahan peta politik Nasional telah membawa dampak terbukanya kran Demokrasi dan kebebasan bagi rakyat. Berkembangnya tuntutan dinamika dan aspirasi masyarakat saat ini adalah merupakan pemicu untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas Pemerintahan yang baik yaitu dengan memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya dan dapat semudah mungkin dijangkau masyarakat.

Perubahan lingkungan seperti diuraikan diatas, menuntut manajemen organisasi Kecamatan Lolayan mengubah logika yang dipakai sebagai dasar menjalankan roda organisasinya. Pengetahuan manajemen berkembang melalui proses pergeseran paradigma yaitu manajemen tradisional, bergeser kepada paradigma baru sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

d. Pertanian dan Perkebunan

Wilayah kecamatan Lolayan memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang cukup baik sehingga perlu adanya peningkatan Prasarana jalan yang lebih memadai

C. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN LOLAYAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lolayan menghadapi beberapa permasalahan yang merupakan isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penataan gedung kantor guna pemenuhan standar kelayakan kerja
2. Kurangnya sarana kendaraan Dinas/Operasional sebagai sarana untuk melaksanakan tugas
3. Perlu adanya pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, sehingga dapat menghasilkan aparatur yang kreatif dan inovatif
4. Perlunya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap Kelurahan/Desa bersama dengan aparat terkait.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow

Berdasarkan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow, maka visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 adalah:

**“BOLAANG MONGONDOW YANG BARU, BERBUDAYA, BERDAYA SAING
DAN MANDIRI SEBAGAI LUMBUNG PANGAN INDONESIA TIMUR”**

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 tersebut dirumuskan melalui 5 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan bebas KKN;
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur;

Kecamatan Lolayan sesuai tugas dan fungsinya mendukung misi ke4 yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN.

Dan mendukung Tujuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Visi dan Misi Kecamatan Lolayan

Untuk mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow maka Kecamatan Lolayan menetapkan :

Visi :

“Bolaang Mongondow yang Baru, Berbudaya, Berdaya saing dan Mandiri sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kecamatan Lolayan menetapkan misi sebagai berikut : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis dan bebas KKN”

3. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lolayan

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Kecamatan Lolayan

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lolayan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke.			
						2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah	57,09			75	75	90	95
2.			58,6	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	63	70	73	78

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut komitmen Kecamatan Lolayan untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Lolayan tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Kecamatan Lolayan tahun 2025:

Revisi Perjanjian Kinerja Kecamatan Lolayan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	73	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.975.875.552.-
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 17.064.700.-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kecamatan Lolayan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lolayan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	Hasil Penelitian oleh KemenPAN dan RB	73

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra). RKT TA. 2025 ini juga merupakan gambaran kegiatan dan output Kecamatan Lolayan yang dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Kecamatan Lolayan dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	73

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Kecamatan Lolayan, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

Pengukuran kinerja tahun 2024 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2024. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan(PKK).
- Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85 = Sangat berhasil

$70 < X \leq 85$ = Berhasil

$55 < X \leq 70$ = Cukup Berhasil

≤ 55 = Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”.

Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada

	Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai <i>mean</i> setiap kategori
Capaian Sasaran=	
	Jumlah indikator kinerja sasaran

di kelompok sasaran tersebut.

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Lolayan terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran . diketahui bahwa tujuan dari pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan social kemasyarakatan adalah dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lolayan dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui peningkatan system akuntabilitas kinerja pemerintah. Uraian dan analisis capaian kinerja masing- masing sasaran kecamatan Lolayan adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan

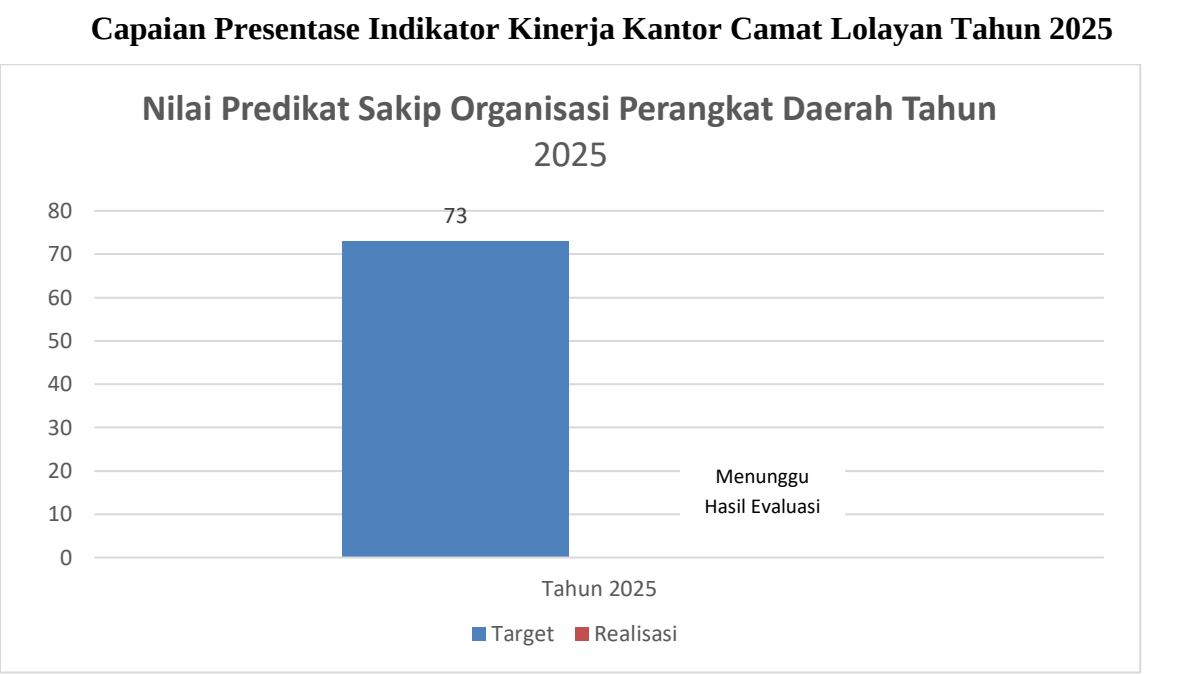
Pengukuran tingkat capaian sasaran “Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan” dengan indikator sasaran “Nilai Predikat SAKIP Organisasi Perangkat Daerah” dilakukan melalui penilaian menyeluruh dari peningkatan kinerja pemerintah kecamatan. SAKIP merupakan bagian penting dalam penyelenggaran dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Sehingga peningkatan kinerja sangat berhubungan dengan tingkat pelayanan public dari suatu instansi khususnya menyangkut urusan kewilayahan (kecamatan). Dalam penghitungan nilai sakip didasarkan pada penilaian yang dilaksanakan oleh tim evaluator sakip pemerintah yang dilakukan oleh inspektorat daerah. Sehingga untuk penentuan formula didasarkan dari nilai LHE tim evaluator.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kecamatan Lolayan tahun 2025

Tabel 3.1
Capaian Indikator Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	73	Dalam tahap Penyusunan	0

Berdasarkan table diatas Nilai Sakip Kecamatan Lolayan Tahun 2025 belum bisa diukur, sehingga capaian Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Lolayan pada Tahun 2025 belum dapat disimpulkan pencapaiannya.



2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Tabel 3.2

Capaian Indikator Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2025

	INDIKATOR	2024			2025			TARGET AKHIR RENSTRA
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	70	70	100	73	Menunggu Hasil Evaluasi	0	78

Nilai Sakip Kecamatan Lolayan Tahun 2025 belum bisa diukur, sehingga capaian Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Lolayan pada Tahun 2025 belum dapat disimpulkan pencapaiannya. Pada Tahun 2024 Kecamatan Lolayan memperoleh Nilai 70,00 atau Predikat B mencapai target.

Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Lolayan Tahun 2024 dan Tahun 2025



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja **Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah** Tahun 2021-2025 berdasarkan Target Akhir Renstra secara rinci dapat diuraikan pada table berikut :

N o	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	77,82	78,81	71,10	70	Menunggu Evaluasi	78

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah dan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada peraturan Menteri tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

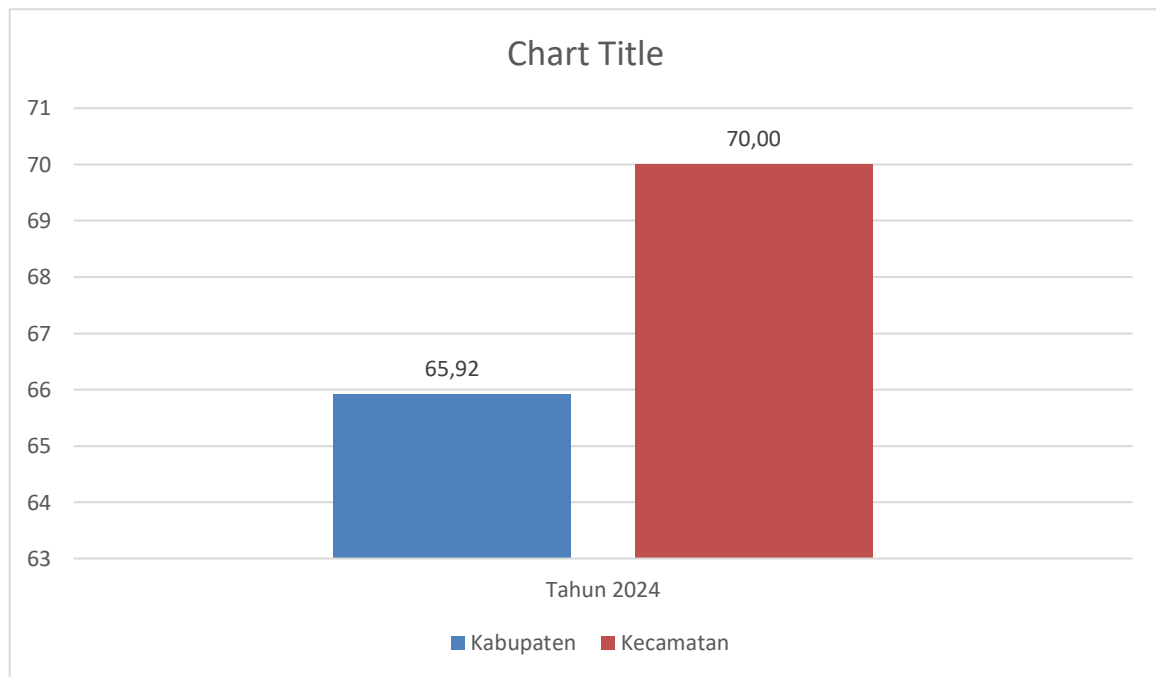
- Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Kecamatan Lolayan masih dalam tahap Penyusunan.
- Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Kecamatan Lolayan berhasil meraih Nilai 70,00 dengan predikat “B”.
- Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Kecamatan Lolayan berhasil meraih Nilai 71.10 Dengan Predikat “B”



4. Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional (Jika ada)
Adapun perbandingan Capaian dengan standart Nasional yang ada dapat kita lihat pada tabel berikut :

Instansi	Nilai
Kabupaten	65,92
Kecamatan	70,00

Berdasarkan table diatas sesuai hasil evaluasi KemenPAN Tahun 2024 Kabupaten memperoleh Nilai 65,92 dan Kecamatan sesuai evaluasi Inspektorat Daerah Tahun 2024 memperoleh nilai 70,00, data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.



5. **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan** Hasil Evaluasi mengacu pada tahun sebelumnya menunjukkan perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2024	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,89
2	Pengukuran Kinerja	30	18,78
3	Pelaporan Kinerja	15	11,33
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi		70,00
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Rekomendasi :

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam hasil evaluasi

a. Komponen Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- Menyampaikan dokumen croscuting Perangkat Daerah;
- Melaksanakan Rapat Pembahasan terkait perumusan dan penyusunan perencanaan kinerja internal Perangkat Daerah;
- Melaksanakan pemantauan berkala atas Rencana Aksi dalam rangka perbaikan /penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang baik;
- Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya ;
- Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik ;

b. Komponen Evaluasi atas pengukuran kinerja

- Menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan pedoman teknis pengumpulan data kinerja internal perangkat daerah baik berupa SK dan /atau SOP ;
- Melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit kerja secara berkala sampai pad level bawah secara berjenjang sebagai dasar penyesuaian strategi, kebijakan dan anggaran dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- Menyusun Dokumen Laporan kinerja secara berkala (triwulan/semester);
- Mempublikasikan Dokumen laporan kinerja pada website perangkat daerah;
- Melaksanakan Rapat internal perangkat daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dan digunakan sebagai dasar penyesuaian aktifitas dan anggaran dalam mencapai target kinerja perangkat daerah ditahun berikutnya

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal pada perangkat daerah secara berjenjang;
- Melaksanakan rapat internal perangkat daerah pembahasan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja;
- Menyampaikan bukti tindak lanjut dan Matriks rencana aksi tindak lanjut ke Tim Evaluator AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	Dalam Proses Penyusunan	95,96%	-

Target Efisiensi Pada Indikator Capaian Kinerja dalam proses penyusunan dan capaian Realisasi Anggaran Sebesar 95,96 %.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lolayan pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Lolayan memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Kecamatan Lolayan pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2.992.940.252,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 2.872.036.625,00 atau 95,96%, sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.083.601.615,00 atau 95,75%, Belanja modal yang dikelola Kecamatan Lolayan pada tahun anggaran 2025 belanja Modal Rp. 2.775.000 sedangkan realisasi belanja Modal pada tahun 2024 Tidak ada

Untuk lebih jelasnya besar anggaran dan realisasi APBD Kecamatan Lolayan pada Tahun Anggaran 2025 dan perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5	BELANJA DAERAH	2.992.940.252,00	2.872.036.625.	95,96	3.083.601.615,003.
5.1	BELANJA OPERASIONAL	2.990.165.252,00	2.869.336.625	95,96	083.601.615,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.755.367.564,00	2.668.748.625	96,86	2.826.010.160,0025
5.1.2	Belanja Barang/Jasa	234.797.688,00	200.588.000	85,43	7.591.455,00
5.2	BELANJA MODAL	2.775.000,00	2.700,00	97,30	00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	00	00	-	00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(2.992.940.252,00)	(2.872.036.625,00)	95,96	(3.083.601.615,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.992.940.252,00)	(2.872.036.625,00)	95,96	(3.083.601.615,00)

2. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Capaian kinerja realisasi anggaran program / kegiatan / sub kegiatan pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.975.875.552	2.856.236.625	95,98
• <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.778.412.854,00	2.690.318.045,00	96,83
• Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.746.367.564,00	2.661.148.625,00	96,90
• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	26.719.003,00	25.074.000	93,84

• Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.326.287	4.095.420	76,89
• Administrasi umum perangkat daerah	85.101.500,	77.143.200,	90,65
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	957.500	893.000	93,26
• Fasilitasi kunjungan tamu	4.590.000	4.420.000	96,30
• Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	79.554.000	71.830.200	90,29
• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.775.000	2.700.000	97,30
• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.775.000	2.700.000	97,30
• Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahn Daerah	78.270.500	64.222.730	82,05
• Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12.770.500	9.222.730	72,22
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.500.000	55.000.000	83,97
• Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	31.315.698	21.852.650	69,78
• Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	30.065.698	20.664.950	68,73
• Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	1.250.000	1.187.700	95,02
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.064.700,	15.800.000	92,59
• Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	17.064.700	15.800.000	92,59
• Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	17.064.700	15.800.000	92,59
BELANJA	2.992.940.252	2.872.036.625	95,96

3. Hambatan Dan Kendala dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

I. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota

Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
Capaian target kinerja keuangan 96,90% tidak ada permasalahan karena kebutuhan gaji sesuai yang dianggarkan.
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
Capaian target kinerja Keuangan 93,84% tidak ada permasalahan karena pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan sesuai dengan yang dianggarkan.
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Capaian target kinerja Keuangan 76,89 % tidak ada permasalahan karena kebutuhan sesuai dengan yang dianggarkan

2. Administrasi umum perangkat daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Capaian kinerja keuangan 93,26 % tidak ada permasalahan karena kebutuhan Makan Minum Rapat sesuai dengan yang dianggarkan
- Fasilitasi kunjungan tamu
Capaian kinerja keuangan 96,30 % tidak ada permasalahan karena kebutuhan Makan Minum Rapat sesuai dengan yang dianggarkan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Capaian kinerja keuangan 90,29% tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.

3. Pengadaan Barang Milik Daerah

- Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya Capaian kinerja keuangan 97,30% tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan

4. *Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*

- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Capaian kinerja keuangan 72,22% tidak ada permasalahan karena penyerapan anggaran sesuai yang dibutuhkan.
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Capaian kinerja keuangan 83,97% tidak ada permasalahan

5. *Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan
Capaian kinerja keuangan 68,73% terdapat permasalahan karena dalam belanja pemeliharaan alat angkutan darat terdapat belanja BBM yang realisasinya disesuaikan dengan struk BBM yang ada sesuai dengan kebutuhan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Capaian Kinerja keuangan 95,02 %, tidak ada permasalahan karena Menyesuaikan dengan pagu yang ada

II. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan :

1. *Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*

- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
Capaian kinerja keuangan 92,59 % tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Kecamatan Lolayan 2023-2026 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

A. KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan capaian kinerja organisasi sebagaimana uraian pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sasaran Kecamatan Lolayan pada tahun 2025 pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan adalah masih menunggu, Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja Kecamatan Lolayan pada tahun 2025 adalah mencapai 95,96%.

Berbagai pelaksanaan program yang dilakukan pada TA. 2025 ini merupakan hasil dari penyusunan program yang telah melibatkan berbagai stakeholders. Penyusunan program dan pelaksanaannya tetap berada pada alur dan koridor perencanaan strategis Kecamatan Lolayan 2023 – 2026 sehingga semua kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun 2025 tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Lolayan tahun 2023-2026.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berada dalam organisasi pemerintah kabupaten, maka program-program yang dilakukan tetap dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dan diarahkan sebagai media dan sarana untuk mendukung Visi dan Misi serta Rencana Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Lolayan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2023 - 2026.
2. Mengevaluasi Program dan Kegiatan yang belum terimplementasi secara maksimal untuk dilakukan perbaikan antara lain mengkoordinasikan kepihak terkait.
3. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Pemerintah Kecamatan Lolayan dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Mengkoordinasikan rencana program dengan Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah tentang skala prioritas program kegiatan sesuai dengan Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kecamatan Lolayan yang mengacu kepada tahapan pelaksanaan Renstra tahun 2023- 2026.
5. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi

Tungoi I, Januari 2026


CAMAT LOLAYAN,
FAISAL M. MANOPPO, S.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690329 199512 1 003